Science and Education Journal
Vol 5 No 2 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

# Optimalisasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pemberdayaan Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Studi Kasus Di Desa Mulyasari

**Pandu Ari Pramudya[1], Evi Priyanti[2], Naila Nabiila[3]**
[1]Universitas Singaperbangsa Karawang, panduari252003@gmail.com
[2]Universitas Singaperbangsa Karawang, evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id
[3]Universitas Singaperbangsa Karawang, nailanabiila944@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Mulyasari. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota LKD, perangkat desa, dan masyarakat, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKD, melalui BPD, LPM, Karang Taruna, BUMDes, dan PKK, berperan signifikan dalam menampung aspirasi masyarakat, merancang program pembangunan, memotivasi partisipasi pemuda, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan meningkatkan ekonomi lokal. Kolaborasi antara LKD, pemerintah desa, dan pihak terkait melalui forum Minggon Desa efektif meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, peran pasif sebagian masyarakat menjadi kendala. Disarankan untuk meningkatkan kapasitas LKD melalui pelatihan, mengoptimalkan forum koordinasi, melakukan sosialisasi intensif, mengalokasikan anggaran operasional yang memadai, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan desa.

**Kata Kunci:** *Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Kolaborasi, Desa Mulyasari.*

**Abstract**

This research aims to optimize the role of Village Community Institutions (LKD) in empowering and increasing community participation in Mulyasari Village. The research method used is qualitative with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews with LKD members, village officials, and the community, as well as literature study. The results showed that LKD, through BPD, LPM, Karang Taruna, BUMDes, and PKK, played a significant role in accommodating community aspirations, designing development programs, motivating youth participation, improving family welfare, and increasing the local economy. Collaboration between LKD, village government, and related parties through the Minggon Desa forum effectively increased community participation. However, the passive role of some communities is a constraint. It is recommended to increase LKD capacity through training, optimize coordination forums, conduct intensive outreach, allocate adequate operational budgets, and raise community awareness of the importance of active participation in village development.

**Keywords:** *Village Community Institutions, Community Empowerment, Community Participation, Collaboration, Mulyasari Village.*

**Corresponding Author:**
Pandu Ari Pramudya
Universitas Singaperbangsa Karawang, panduari252003@gmail.com

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

## PENDAHULUAN

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) memegang peranan krusial dalam mendorong pemberdayaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat desa (Denti Kardeti, 2024; Emiraldo Win Pazqara, 2024). Optimalisasi fungsi LKD menjadi esensial untuk memastikan program-program yang dijalankan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks ini, LKD berperan sebagai mitra strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang merupakan representasi masyarakat dalam pemerintahan desa, dalam menyalurkan aspirasi dan mengidentifikasi kebutuhan warga untuk merancang program pemberdayaan yang tepat (Malik, 2020). Keberadaan LKD sebagai wadah partisipasi masyarakat juga sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan melibatkan LKD secara aktif, pemerintah desa dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga meningkatkan legitimasi dan dukungan publik terhadap pemerintahan desa.

Namun, implementasi peran LKD dan BPD tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa di antaranya meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di antara anggota BPD, minimnya anggaran operasional dan fasilitas yang memadai, serta kurangnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan desa. Akibatnya, pemahaman dan partisipasi warga dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan pemerintahan desa menjadi rendah. Rendahnya kapasitas SDM anggota BPD dapat menghambat kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pemerintahan desa, serta dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Minimnya anggaran operasional dan fasilitas yang memadai juga dapat membatasi kemampuan BPD dan LKD dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat, serta dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan desa dapat menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mengurangi partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Dalam konteks pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, optimalisasi peran LKD dan BPD menjadi sangat krusial di Desa Mulyasari. BPD bertugas sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat, menggali aspirasi serta kebutuhan warga dengan lebih mendalam. Struktur perwakilan BPD yang terdiri dari tujuh anggota, masing-masing mewakili satu Rukun Warga (RW), memberikan keleluasaan bagi BPD untuk lebih responsif terhadap isu yang dihadapi masyarakat, serta memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara warga dan pemerintah desa. Model perwakilan ini memungkinkan BPD untuk memahami secara lebih mendalam permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing RW, serta untuk merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, komunikasi yang efektif antara BPD dan masyarakat juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Aktivitas BPD dalam menyelenggarakan rapat mingguan menjadi forum penting bagi anggota BPD untuk mengemukakan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencari solusi secara bersama-sama. Dalam rapat mingguan ini, anggota BPD dapat saling bertukar informasi dan pengalaman, serta merumuskan strategi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, rapat mingguan juga menjadi ajang bagi anggota BPD untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat kepada

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

pemerintah desa, serta untuk mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan desa. Dengan demikian, rapat mingguan menjadi forum yang sangat penting bagi BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Selain itu, BPD juga berperan dalam mengoordinasikan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, sehingga masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi (Nadhira Nurkhalisa, 2024). Keterlibatan BPD dalam kegiatan sosial dan keagamaan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas sosial di antara masyarakat, serta memperkuat hubungan antara BPD dan masyarakat. Selain itu, kegiatan sosial dan keagamaan juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada BPD, serta untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dengan demikian, peran BPD dalam mengoordinasikan kegiatan sosial dan keagamaan sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Meskipun demikian, kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi perlu terus ditingkatkan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dapat menghambat upaya BPD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi, seperti melalui sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan. Selain itu, perlu juga diciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat, seperti dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan, serta dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui kolaborasi dengan lembaga kemasyarakatan lainnya dan pemerintah desa, BPD dapat memperkuat jaringan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan desa (Leonita Siwiyanti, 2021). Kolaborasi antara BPD, lembaga kemasyarakatan lainnya, dan pemerintah desa dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program pembangunan desa, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, perlu dibangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara BPD, lembaga kemasyarakatan lainnya, dan pemerintah desa.

Dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh melalui perwakilan mereka, BPD dapat memastikan bahwa program-program pemberdayaan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga setempat. Program-program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat secara cermat dan komprehensif, serta perlu dirumuskan program-program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran aktif LKD dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, bentuk kolaborasi antara LKD, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya, khususnya dari sudut pandang BPD, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, serta peran pasif LKD di Desa Mulyasari dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran LKD dan BPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota LKD, perangkat desa, dan masyarakat, serta melalui studi dokumentasi dan observasi

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

partisipatif. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk menghasilkan temuan yang komprehensif dan mendalam mengenai peran LKD dan BPD dalam meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di Desa Mulyasari. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang praktis dan aplikatif bagi pemerintah desa dan LKD dalam meningkatkan efektivitas program-program pemberdayaan masyarakat dan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Aspek etika penelitian, seperti informed consent, kerahasiaan, dan anonimitas responden. Peneliti akan memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada responden mengenai tujuan, prosedur, dan manfaat penelitian, serta akan meminta persetujuan responden untuk berpartisipasi dalam penelitian. Peneliti juga akan menjaga kerahasiaan dan anonimitas responden, serta akan menggunakan data yang terkumpul hanya untuk keperluan penelitian. Dengan memperhatikan aspek etika penelitian, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang valid dan reliable, serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait optimalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi warga. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, dan interaksi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat secara komprehensif (Creswell & Plano Clark, 2018). Dalam konteks ini, pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu lokasi tertentu, yaitu Desa Mulyasari. Lokasi ini dipilih berdasarkan karakteristik uniknya, seperti struktur LKD yang aktif serta tantangan spesifik dalam pemberdayaan masyarakat yang memerlukan eksplorasi mendalam.

Pendekatan studi kasus memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk menggali data dari berbagai sumber, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Pendekatan ini sangat relevan ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" terkait fenomena yang kompleks (Yin, 2018). Studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan data dari berbagai perspektif guna memahami hubungan antara LKD, perangkat desa, dan masyarakat dalam proses pemberdayaan. Dalam situasi di mana batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas, studi kasus menjadi alat yang efektif untuk mengidentifikasi pola-pola interaksi yang terjadi di lapangan.

Desa Mulyasari menjadi fokus penelitian karena memiliki struktur LKD yang terdiri dari beberapa lembaga strategis, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, dan PKK. Keberadaan BPD sebagai mitra strategis LKD memberikan peluang untuk mengeksplorasi bagaimana lembaga-lembaga tersebut berkolaborasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, struktur representatif BPD yang terdiri dari tujuh anggota mewakili setiap Rukun Warga (RW) di desa memberikan dasar yang kuat untuk memahami dinamika partisipasi warga dalam pembangunan desa. Pendekatan studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam optimalisasi peran LKD. Salah satu keunggulan pendekatan ini adalah kemampuannya untuk menciptakan narasi yang kaya tentang bagaimana lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai fasilitator pembangunan sekaligus penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Dengan mengamati langsung kegiatan seperti rapat mingguan BPD atau program pemberdayaan masyarakat, peneliti dapat menggali informasi mendalam tentang efektivitas strategi kolaboratif yang dijalankan oleh LKD.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus tidak hanya digunakan untuk memahami peran LKD secara teoritis tetapi juga untuk mengevaluasi implementasinya dalam konteks lokal. Hal ini mencakup analisis terhadap upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) anggota LKD melalui pelatihan dan pendampingan, penguatan koordinasi antara lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintah desa, serta penyediaan anggaran operasional yang memadai guna mendukung kinerja mereka. Dengan demikian, pendekatan studi kasus menjadi alat penting untuk menghasilkan temuan yang relevan dan aplikatif bagi pengembangan kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi literatur yang saling melengkapi untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai peran, tantangan, dan strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-interpretatif. Metode ini tidak hanya berfokus pada angka atau statistik, tetapi lebih kepada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Analisis data kualitatif melibatkan pemeriksaan sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan, termasuk dokumen dan catatan, untuk menemukan pola atau tema yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *1. Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat*

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) memainkan peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa lembaga yang aktif berkontribusi di Desa Mulyasari. Di antaranya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Keberhasilan pemberdayaan masyarakat di desa sangat ditentukan oleh sejauh mana LKD mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa program-program yang diimplementasikan relevan dengan kebutuhan tersebut. Sinergi antara LKD dan pemerintah desa menjadi kunci dalam mewujudkan desa yang lebih mandiri dan berdaya. Dengan demikian, peran aktif LKD dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan kesehatan, tetapi juga mencakup aspek ekonomi yang sangat penting. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Desa Mulyasari menunjukkan bahwa ketika berbagai lembaga kemasyarakatan bekerja sama dan saling mendukung, hasil yang dicapai akan lebih optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus berkomitmen dalam memperkuat peran LKD demi tercapainya tujuan pembangunan desa yang lebih baik.

### *2. Bentuk Kolaborasi Antara Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat*

Kolaborasi antara LKD, pemerintah desa, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Kolaborasi ini terlihat dalam cara BPD menyampaikan informasi kepada masyarakat. Alih-alih harus bertemu langsung dengan seluruh warga, BPD memanfaatkan bantuan dari perwakilan RT/RW, di mana setiap anggota BPD berkomunikasi langsung dengan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Model komunikasi ini memungkinkan distribusi informasi dan koordinasi

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

program dapat berlangsung lebih efisien. BPD berperan aktif dalam mengoordinasikan informasi dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai aktivitas yang mendukung pembangunan desa. Menurut Wijayanto dan Putri (2021), mekanisme forum komunikasi yang rutin dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat desa. kolaborasi ini juga mencakup pemantauan kinerja lembaga-lembaga desa oleh masyarakat melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, kolaborasi antara LKD dan pemerintah desa di Desa Mulyasari menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi aktif masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan, hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga desa. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program pemberdayaan tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling mendukung.

### *3. Peran Pasif Masyarakat Dalam Mendukung Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa*

Teori Soekanto (2009) menjelaskan bahwa lembaga kemasyarakatan berfungsi untuk mengatur hubungan sosial, menjaga stabilitas, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga membantu dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme musyawarah dan koordinasi yang terstruktur. Dengan itu, lembaga sosial berperan dalam menciptakan keteraturan dan memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Berdasarkan hasil wawancara, BPD dan lembaga lainnya rutin mengadakan pertemuan, baik dalam bentuk briefing maupun Minggon Desa, untuk membahas permasalahan yang ada di masyarakat. Prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif ini mencerminkan bagaimana lembaga sosial bekerja dalam mendorong perubahan sosial yang terarah. Meskipun lembaga kemasyarakatan memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui struktur yang ada, peran pasif sebagian anggota masyarakat menjadi kendala yang harus diatasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa dan lembaga terkait untuk terus mendorong partisipasi aktif melalui berbagai inisiatif seperti sosialisasi dan pelatihan yang meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan desa.

## KESIMPULAN

Penelitian mengenai optimalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Mulyasari menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah contoh lembaga yang berperan penting dalam proses ini. Teori Soekanto menjelaskan bahwa lembaga kemasyarakatan berfungsi untuk mengatur hubungan sosial, menjaga stabilitas, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan agar merasa memiliki tanggung jawab terhadap program-program tersebut, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga agen perubahan yang aktif.

## DAFTAR PUSTAKA

Denti Kardeti, R. A. (2024). Optimalisasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Melalui Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurus Di Desa Cijati Kabupaten Sumedang Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Pekerja Sosial*.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Emiraldo Win Pazqara, J. M. (2024). Optimalisasi Peran Lembaga Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan Di Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 114-119.

Leonita Siwiyanti, M. K. (2021). Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Masyarakat Mandiri*.

Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 325-330.

Nadhira Nurkhalisa, G. G. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. *Communnity Development Journal*.

NOVA LINDA, H. A. (2023). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 883-893.